

Perilaku Kepemimpinan Umar Abdul Aziz (Khalifah Umayyah) Dalam Sistem Pemerintahan Islam

Yeni Sri Lestari

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
Email: yenisrilestari@utu.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas perbandingan antara keberhasilan kepemimpinan Umar Abdul Aziz melalui pendekatan perilaku dengan sistem pemerintahan saat ini yang dilakukan oleh model pemimpin lainnya. Pembahasan ini dianggap penting dikarenakan dua sebab, pertama sistem pemerintahan di Indonesia yang mayoritas dipimpin oleh pemimpin muslim tidak lagi mengindahkan nilai-nilai keislaman serta kepemimpinan yang bagaimana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi, politik dan sosial. Hasil kajian mendapati perilaku Umar Abdul Aziz dalam memerintah banyak membawa perubahan yang positif bagi kaum Bani Umayyah pada masa kekuasaan Umar. Beberapa aspek positif banyak dijumpai dalam pembangunan baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Pada beberapa negara yang saat ini dipimpin oleh seorang Muslim seharusnya dapat menjadikan model kepemimpinan Umar sebagai teladan.

Keyword: perilaku; pemerintahan; islam.

1. PENDAHULUAN

Kehebatan zaman pemerintahan Islam dalam sejarah dunia merupakan hal yang sangat mengagumkan. Hingga hari ini, masih banyak dijumpai pemimpin yang memiliki upaya dan semangat untuk menegakkan sistem pemerintahan yang teguh dengan mempertahankan nilai-nilai dan prinsip ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan dilestarikan oleh pemimpin umat setelah wafatnya Rasulullah, seperti sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh *Khulafah Ar-Rasyidin*.

Menyelusuri perjalanan zaman pemerintahan *Khulafah Ar-Rasyidin* tersebut, kegemilangan kuasa Islam yang bermula di Kota Madinah al-Munawwarah, merupakan kota yang dahulunya bernama Yathrib. Tepatnya pada hari Senin, 20 September 622 Masehi, ketika terjadinya perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah menandai Madinah mulai menjadi ibu kota kerajaan Islam dan kiblat pemerintahan yang baik pada masa itu.

Di bawah pemerintahan *Khulafa ar-Rasyidin*, empayar Islam berkembang dengan sangat cepat yang dibuktikan dengan kekuatan tentara Islam mampu menaklukkan kota-kota penting seperti Damaskus, Baitulmuqaddis, Iskandariah, dan Baghdad. Setelah kepemimpinan keempat *Khulafa al-Rasyidin* dimana pemimpin terakhir pada masa tersebut adalah Saydina Ali bin Abi Talib RA, Muawiyah yang pada ketika itu merupakan Gubernur Damaskus mengubah pusat pemerintahan kerajaan Islam ke

Damaskus. Beliau kemudiannya mendirikan dan membentuk Pemerintahan Islam Bani Umayyah.

Pemerintahan Bani Umayyah merupakan pemerintahan khalifah Islam berlandaskan kepada penurunan ahli waris pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari keluarga di dalam kaum Quraiys di Mekah. Pemerintahan Bani Umayyah berkuasa dari tahun 661 Masehi hingga tahun 750 Masehi. Padahal, kaum Bani Umayyah sebelumnya merupakan musuh berat umat Islam sebelum mereka memeluk Islam.

Pemerintahan Bani Umayyah mengambil nama kebesaran mereka dari nama datuk Muawiyah, penggagas pemerintahan ini yaitu Umayyah bin Abdul Syams, seorang pemimpin kaum Quraiys yang kaya dan berpengaruh. Muawiyah telah menjadi Gubernur Syria di bawah pemerintahan khalifah ketiga Islam, Saidina Uthman bin Affan. Pada tahun 35 Hijriah, kota Madinah yang menjadi ibu kota negara Islam telah dilanda krisis politik yang hebat sehingga mencetuskan pemberontakan yang menentang pemerintahan. Akibatnya, Khalifah Uthman bin Affan dibunuh oleh pemberontak. Selepas peristiwa pembunuhan Saydina Uthman, Saydina Ali Abi Talib telah dilantik menjadi khalifah yang baru.

Mengingat bahwa pembunuh Saydina Uthman belum dihukum oleh Saydina Ali, Muawiyah enggan menerimanya sebagai khalifah dan menentang Saydina Ali pada tahun 657 Masehi. Beliau tidak mengakui Saydina Ali menjadi khalifah karena Muawiyah telah menuduh Saydina Ali terlibat dalam kesepakatan untuk membunuh Khalifah Uthman. Kedua pihak bersetuju untuk berunding untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Perundingan ini dilihat oleh para pengikut Saydina Ali sebagai kesepakatan yang tidak adil. Pada akhirnya, kekuasaan empayar Islam dipecahkan.

Wafatnya Saydina Ali pada tahun 661 Masehi, maka anak Saydina Ali yaitu Saydina Hassan telah menjadi khalifah namun baginda telah mengambil keputusan untuk memberi jawatan khalifah kepada Muawiyah sebagai khalifah seluruh empayar Islam dengan harapan supaya Muawiyah dapat menyatukan umat Islam pada masa itu karena Saydina Hassan tidak sanggup lagi melihat perpecahan umat Islam terus berlaku di hadapan matanya. Hal ini menyebabkan terbentuknya Pemerintahan Bani Umayyah yang berdasarkan garis keturunan dan menyaksikan pertukaran pusat pemerintahan dari kota Madinah ke Damaskus.

Pemerintahan Bani Umayyah dapat dikatakan sebagai fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama kurang lebih satu abad. Fase tersebut dapat dikatakan mengalami perubahan bukan saja dari sudut sistem kekuasaan yang berdasarkan kekeluargaan, namun terjadi juga perubahan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Antara lain adalah terbentuknya penghapusan sistem nepotisme dan perkembangan kekuasaan wilayah jajahan hingga ke Sepanyol, Afrika Utara, Timur Tengah dan juga masa pemerintahan tersebut menjalar hingga ke Nusantara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai kepemimpinan Umar Abdul Azis pernah dilakukan oleh Umar Prasetyo yang berjudul “Kepemimpinan Spiritual Umar Bin Abdul Aziz”. Kajian ini mendapati bahwa kepemimpinan spiritual Umar merupakan gaya kepemimpinan spiritual yang bertansformasi dari dimensi keduniaan kepada dimensi spiritual (keilahian) yaitu sebuah kepemimpinan yang menjunjung ketakwaan, bijak, adil berlandaskan kepada hukum Al-Qur’an dan Hadis. Selain itu, kredibilitas kepemimpinan Umar dalam perilaku dan sifat utamanya adalah takwa, zuhud, tawadhu, wara’, santun, pemaaf, tegas, adil dan bijaksana. Sehingga pada masa pemerintahannya banyak menghasilkan kebijakan dan pengaruh yang positif bagi rakyatnya.

Kajian selanjutnya dilakukan oleh Nana Audina yang berjudul “Sistem Pemerintahan *Good Governance* Umar Bin Abdul Aziz” kajian ini mendapati bahwa pada masa pemerintahan yang dilakukan oleh Umar telah berhasil membawa kesejahteraan secara menyeluruh bagi rakyat dan membentuk sebuah sistem pemerintahan yang adil, bebas dan kebersamaan pada kaum muslimin sehingga segala bentuk kezaliman yang pernah ada sebelumnya tidak lagi dirasakan pada masa pemerintahan Umar Abdul Aziz.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan ini akan membahas mengenai perilaku kepemimpinan Umar Abdul Azis yang memerintah pada masa kekhalifan Umayyah. Kajian permasalahan ini melingkupi penggunaan konsep perilaku pemimpin dalam melaksanakan sistem pemerintahan pada masa kekuasaannya. Penulisan ini menggunakan tehnik pengumpulan data penelitian kepustakaan (studi pustaka) yaitu pengumpulan data dilakukan melalui data-data yang diperoleh dari pengumpulan sumber bacaan yang meliputi buku, jurnal, surat kabar dan lain-lain.

Variabel penelitian dalam penulisan ini ialah perilaku dan sistem pemerintahan Abdul Azis. Penelitian ini menggunakan tehnik analisis penelitian yang kualitatif, yaitu penelitian ini menganalisis permasalahan dan menguraikan pembahasan menggunakan kata-kata atau deskriptif.

Dokumentasi dalam kajian ini merupakan metode pengumpulan data penguat melalui artikel, arsip-arsip, dan teori-teori yang terdapat dalam buku-buku tertentu yang berkaitan dengan perilaku dan sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Umar Abdul Azis. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan berita-berita yang dipublikasikan dalam bentuk artikel dan tulisan lainnya yang terkait untuk kemudian dianalisis secara mendalam.

Analisis data penelitian merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis dan terstruktur data yang diperoleh melalui studi pustaka sehingga data yang diperoleh akan lebih mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis

yang dilakukan bertujuan untuk merangkai hubungan dan konsep dalam analisa data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini meliputi, pertama melakukan penelitian kepustakaan meliputi buku, artikel maupun surat kabar, setelah data terkumpul akan disusun atau dinarasikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang lebih tertata dan kompleks. Selanjutnya untuk validitas data, peneliti menggunakan metode triangulasi, yaitu metode pengecekan terhadap data yang diperoleh melalui pelbagai sumber.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz atau dikenal dengan nama lahirnya Abu Hafs, Umar ibnu Abd al-Aziz ibnu Marwan ibnu al-Hakam al-Umawiy al-Qurashiy. Beliau dilahirkan pada 61 Hijriah (682 Masehi). Kakek dari ibunya adalah Saydina Umar al-Khattab, *Khulafah ar-Rasyidin* kedua setelah Saydina Abu Bakar as-Siddiq. Dilahirkan di kota Madinah, bapaknya adalah pemerintah di Mesir, iaitu adik dari Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan, khalifah kelima Bani Umayyah. Semasa bapaknya dilantik sebagai pemerintah di Mesir, dia turut dibawa bersama dan menghafal al-Quran di sana. Khalifah Abdul al-Malik ibnu Marwan telah menikahkan anaknya Fatimah dengan Khalifah Umar.

Umar dipilih oleh Khalifah al-Walid ibn Abd al-Malik sebagai pengusaha di Madinah al-Munawwarah pada tahun 87H/ 705M. Kemudian kekuasaannya diperluas lagi hingga meliputi Mekah dan Ta'if dan seterusnya menjadi pemerintah seluruh Hijjaz pada tahun 93H/711M. Namun, dia akhirnya diberhentikan dari jabatan itu disebabkan oleh fitnah yang mengatakan dia melindungi orang yang lari dari pengadilan yang dituduhkan terhadapnya oleh Hajjaj ibn Yusuf, Gubernur Irak.

Umar Abdul Azis dilantik menjadi Khalifah pada tahun 98H (717M) yaitu merupakan khalifah kedelapan Bani Umayyah setelah kematian sepupunya, Khalifah Sulaiman ibnu Abdul Malik, khalifah ketujuh atas wasiat khalifah tersebut walaupun ditentang keras oleh beberapa kerabat Umayyah. Khalifah Umar sebenarnya tidak menginginkan jabatan itu. Oleh karena pelantikan itu, beliaupun mengumpulkan orang-orang di masjid untuk shalat berjemaah lalu menyampaikan keputusannya untuk menolak jabatan tersebut dan memberikannya kepada orang lain, namun mayoritas rakyat yang datang pada majelis tersebut menolak tawaran Umar dan menginginkan Umar untuk menerima jabatan tersebut.

Yusof Qadhrawi menyatakan dalam sebuah bukunya bahwa, para ulama yang menetapkan nama-nama *mujaddid* iaitu pencetus reformasi dalam sejarah dunia Islam bersepakat memilih Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz sebagai *mujaddid* bagi seratus tahun pertama iaitu pada tahun 101 H walaupun masa kekhalifahannya sangat singkat. Reformasi yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar bukan saja melingkupi isu pemikiran dan keilmuan sebagaimana yang dilakukan oleh Imam as-Syafie pada akhir seratus

tahun kedua, tetapi melibatkan amal (praktik) dan juga persoalan hukum. Khalifah Umar memusnahkan taklid-taklid yang menuju kepada kezaliman, menghidupkan keadilan, menghancurkan kezaliman, mengembalikan hak kepada pemiliknya, menolak permohonan orang-orang yang tamak, menyebarkan jiwa takwa dan takut kepada Allah serta perasaan cinta untuk melakukan tindakan dan kegiatan semata-mata karena Allah (Qadhrawi, 1997).

Penjabaran dari pernyataan tersebut, sebenarnya banyak terjadi pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz yang membawa kepada sistem pemerintahan yang berlandaskan Islam yang sebenarnya dan membangun sistem pemerintahan yang sangat mapan pada masa itu. Sistem ini jelas menuntut keadilan dan yang utama menegakkan syiar Islam yang teguh. Perubahan dan reformasi yang dilaksanakan ini dibagi kepada tiga kategori utama iaitu politik, ekonomi dan sosial, dimana perubahan ini berkaitan dengan perilaku Umar Abdul Aziz selama memimpin Bani Umayyah.

Dalam bidang politik, perilaku kepemimpinan Umar Abdul Aziz banyak menyumbang perubahan dalam berbagai aspek pemerintahan seperti kebijakan dalam dan luar negeri, pelantikan pegawai-pegawai pemerintahan dan sebagainya. Banyak pakar sejarah bersepakat mengatakan gaya pemerintahan Umar Abdul Aziz bersandar kepada pemerintahan yang juga pernah dilakukan oleh *khalifah-khalifah ar-Rasyidin* karena bentuk atau cara pemerintahan Umar Abdul Aziz adalah berdasarkan kepada al-Quran dan hadith Rasulullah SAW.

Awal Khalifah Umar dilantik, beliau telah melakukan reformasi yang tidak menentang dari hakikat dan kehendak Islam yang sebenarnya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sistem Pemerintahan dan politik sehat yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz telah menyebabkan banyak ulama dan pemikir Islam seperti seperti Hasan al-Basri, al-Syaabi, Abu Bakar Abdul Rahman dan lain-lain tampil kembali melibatkan diri dalam sistem pemerintahan, untuk mendukung kekuasaan Bani Umayyah menjadi lebih baik lagi.

Awal mula ditetapkan sebagai seorang khalifah, perilaku yang sangat berkesan dari kerendahan hati seorang Umar bin Abdul Azis secara langsung mengumpulkan seluruh penduduk negaranya untuk melaksanakan shalat bersama, setelah itu, sebagai seorang yang telah *dibai'at* oleh khalifah sebelumnya untuk menggantikannya sebagai seorang khalifah, Umar pada mulanya menolak jawatannya dan menyerukan kepada kaum mukminin yang saat itu berkumpul di mesjid untuk memilih seorang khalifah pengganti pada hari pertama ia diumumkan sebagai seorang khalifah.

Perilaku Umar di atas adalah sebuah titik awal adanya prinsip demokratisasi dalam diri Umar untuk menerima kebebasan berpendapat bagi kaum mukminin bagi memilih seorang khalifah pengganti dirinya. Namun demikian, kaum mukminin yang hadir dalam majelis tersebut tidak ingin menggantikan kedudukan Umar sebagai seorang khalifah, hingga pada akhirnya Umar tetap menjadi seorang khalifah dari

golongan Bani Umayyah setelah wafatnya Sulaiman Ibnu Abdul Malik. Keinginan kaum Bani Umayyah pada masa tersebut tetap memilih Umar sebagai pemimpin mereka didasarkan kepada perilaku Umar yang meninggalkan kesan sebagai pemimpin yang rendah hati dan menginginkan wujudnya demokratisasi dalam sebuah pemerintahan.

Pemerintahan Bani Umayyah adalah sebuah pemerintahan yang berlandaskan kepada sistem feodal yaitu merupakan pemerintahan khalifah Islam berdasarkan keturunan pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari keluarga di dalam kaum Quraisy di Mekah. Feodalisme merupakan suatu bentuk susunan lapisan masyarakat yang mengikuti hierarki dan merupakan cara hidup yang merangkumi aspek politik, ekonomi dan sosial. Sistem feodal ini juga merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan yang diperintah oleh individu tertentu yaitu seorang raja atau maharaja yang mempunyai kuasa tertinggi dan dianggap menguasai dan memiliki tanah dan bukan pemerintahan pusat.

Struktur sistem feodal juga adalah berbentuk piramida yang terdiri dari golongan memerintah dan golongan diperintah. Oleh yang demikian, langkah pertama yang diambil oleh Khalifah Umar adalah menghapuskan tradisi feodal yang mewarisi sistem politik di akhir-akhir dinasti Umayyah yang memiliki kekayaan secara tidak logis. Beliau juga mempraktikkan keadilan dan kesederhanaan hidup terhadap diri dan anggota keluarga beliau sebelum rakyat. Harta yang ada termasuk barang perhiasan isterinya diserahkan kepada Baitulmal dan segala perbelanjaan negara berdasarkan konsep hemat-cermat dan berhati-hati atas alasan uang tersebut adalah harta rakyat.

Selain itu, Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz juga begitu tegas memerangi pemerintahan yang zalim. Langkah yang lain diambil seperti pemecatan pegawai pemerintahan yang zalim atau tidak cakap dan menggantikannya dengan orang yang lebih baik dan layak. Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz juga memperhatikan segala tindakan yang dibuat oleh wakil-wakilnya. Beliau memerhatikan setiap penyalahgunaan kekuasaan dan sifat buruk wakil yang menindas rakyat dengan zalim.

Perilaku lainnya yang berkesan dari sistem pemerintahan Umar adalah beliau tidak segan untuk memberhentikan pegawai yang zalim dan menggantinya dengan pegawai yang baik akhlak dan budi pekertinya. Ketegasan pendiriannya dalam menegakkan keadilan kepada seluruh rakyatnya diwujudkan dengan menjalankan hukum-hukum yang hak termasuk memecat pegawai yang tidak tekun. Sebagai contoh, beliau memecat pegawai yang menindas rakyat seperti di Mesir, Khurasan, Iraq dan Afrika dengan mengetatkan peraturan kepada para pegawai agar lebih bertanggungjawab tetapi Umar juga turut menaikkan gaji dan memberikan tunjangan kehidupan lainnya, sebagai imbalan dan bagi menghindari terjadinya penyalahgunaan kuasa. Perilaku Umar dalam menyeimbangkan kinerja birokrasi dapat dicontoh, karena tidak hanya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan kekuasaan namun juga memberikan *reward* terhadap pegawai yang berprestasi dan mengapresiasi kerja pegawai dengan layak sesuai kinerja mereka.

Khalifah Umar juga membuat perubahan terhadap sistem komunikasi yang lebih transparan antara pemerintah dan rakyat. Beliau membentuk kelonggaran terhadap peraturan pejabat Khalifah untuk membolehkan semua lapisan masyarakat menyampaikan saran atau kritik. Beliau menghapuskan praktik nepotisme dan mengembalikan sistem musyawarah dalam pengambilan keputusan. Apabila kerabatnya sendiri tidak mampu menegakkan keadilan dan memerintah dengan baik maka beliau mengadakan musyawarah dan menampung pendapat rakyatnya. Pada masa kepemimpinan Umar inilah musyawarah benar-benar hidup di zamannya menggantikan sistem nepotisme yang bersifat diktator.

Khalifah Umar telah membentuk beberapa lembaga publik untuk menguatkan pemerintahan pada masanya. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Beberapa lembaga yang dibentuk tersebut antara lain adalah lembaga militer, lembaga pengaduan masyarakat dan lain-lain. Untuk mendukung upaya tersebut, Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz juga melantik pengurus di setiap wilayah, pemimpin militer, petugas pajak, ketua polisi, ketua pos, dan pelbagai jabatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan masyarakat.

Umar Abdul Aziz juga telah mengubah kebijakan pemerintahannya dengan mementingkan kepentingan rakyatnya. Sebelum pemerintahan Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, sistem pemerintahan hanya tertumpu pada pemungutan hasil pajak dan pembangunan infrastruktur saja dan tidak mementingkan pembangunan rohani dan keagamaan. Namun, beliau menukar kebijakan dengan mementingkan kepentingan rakyatnya dan mengutamakan prinsip, tuntutan moral dan kehendak agama sehingga sangat sulit untuk berjumpa dengan fakir miskin yang berhak untuk menerima zakat. Kebijakan yang dibentuk oleh Umar telah membawa perubahan pada taraf hidup masyarakatnya, karena pada masa pemerintahannya tersebut tidak lagi dijumpai kaum fakir dan miskin.

Sistem pemerintahan yang berkenaan dengan dasar kebijakan hubungan luar negeri terhadap negara-negara asing dengan negaranya, khususnya negara-negara bukan Islam juga turut dikembangkan oleh Umar. Dasar kebijakan beliau adalah berdasarkan kepada daulah islamiah, hal inilah yang memperkuat sistem reformasi beliau terhadap kebijakan luar negaranya. Khalifah-khalifah sebelumnya menggunakan kebijakan untuk menyerang negara-negara asing, dalam usaha meluaskan jajahan Islam serta akidahnya. Tetapi khalifah Umar tidak suka melakukan pertumpahan darah sesama manusia. Beliau lebih suka melakukan peperangan dengan cara berdakwah. Karena kebijakan tersebut juga Umar dapat meminimalisir tindakan kekerasan terhadap kaum pemberontak seperti kaum Khawarij dengan menggunakan dialog yang sifatnya lebih halus. Perilaku Umar ini berhasil dan memiliki dampak yang lebih positif dibandingkan dengan khalifah-khalifah Umaiyyah sebelumnya.

Pembangunan dalam pemerintahan Umar tidak hanya berdampak kepada persoalan politik dan pemerintahan saja, akan tetapi perilaku kepemimpinan Umar juga

banyak mempengaruhi bidang ekonomi. Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz telah mengambil suatu langkah besar yang mengubah sistem ekonomi yang ada. Sistem pemungutan pajak biasa dihapuskan sama sekali dan pemerintahan melaksanakan sistem pajak yang dianjurkan oleh Islam.

Pembaharuan kebijakan tersebut berkaitan dengan sistem perpajakan, tanah dan taraf hidup kaum budak. Beliau telah menghapuskan hukum pajak tanah karena membebankan para petani. Peningkatan taraf kaum budak dilakukan dengan membela nasib mereka yang ditindas. Gaji buruh juga dinaikkan hingga ada yang mendapatkan gaji seperti gaji pegawai pemerintahan. Beliau juga menghapuskan pajak *jizyah* yang dikenakan kepada orang bukan Islam dengan harapan banyak yang akan memeluk Islam. *Jizyah* adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum Muslimin untuk menuntutnya dari orang-orang kafir, karena mereka tunduk kepada pemerintahan Islam. *Jizyah* ialah pajak yang dikenakan kepada individu bukan Islam yang berlandung di negara Islam. *Jizyah* merupakan harta umum yang dibagikan berdasarkan kemaslahatan rakyat, dan wajib diambil setiap satu tahun dan tidak wajib diambil sebelum satu tahun. Hukum *jizyah* adalah wajib berdasarkan al-Qur'an.

Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz telah mendirikan Baitul Mal dan mengembalikan harta yang tidak sah ke Baitul Mal. Baitul Mal berasal dari Bahasa Arab (*bayt al-mal*) yang bermaksud "rumah harta". Baitul Mal merupakan institusi keuangan yang bertanggungjawab mengurus pajak. Baitul Mal berfungsi sebagai perbendaharaan khalifah yang mengurus keuangan pribadi dan perbelanjaan kerajaan. Selain itu juga mengurus pembagian zakat untuk rakyat. Perilaku amanah yang tinggi mendorong Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz untuk berlaku adil terhadap semua pihak baik kepada dirinya, keluarganya maupun kerabatnya yang dekat sekalipun. Sebagai contoh, beliau menjual hadiah yang diberikan kepada beliau atas pelantikan beliau sebagai Khalifah dan uang tersebut dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Begitu juga kuda-kuda yang dihadiahkan kepada beliau sewaktu diangkat sebagai khalifah, beliau menolak untuk menggunakan kuda-kuda tersebut sebaliknya menggunakan kendaraan sendiri. Selain itu, harta yang ada termasuk barang perhiasan isterinya diserahkan kepada Baitul Mal dan segala perbelanjaan negara berdasarkan konsep hemat-cermat dan berhati-hati atas pertimbangan bahwa harta yang dibelanjakan tersebut adalah harta rakyat.

Tindakan lain yang menjadikan perilaku Umar sangat disenangi oleh rakyatnya adalah segala bentuk jamuan dalam negara tidak dibenarkan menggunakan harta kerajaan. Beliau merampas kembali harta yang diselewengkan oleh pegawai dan mengembalikannya kepada Baitul Mal. Peralatan dan perhiasan upacara resmi negara yang dianggap mewah dihapuskan dan dialokasikan untuk pemasukan ke Baitul Mal bagi membantu rakyat jelata. Harta-harta rakyat yang dipelihara dan diperuntukkan sesuai haknya telah menyebabkan semangat kerja rakyat kembali pulih dan pendapatan rakyat semakin bertambah. Dengan itu, pungutan pajak juga meningkat.

Peningkatan ekonomi rakyat juga dilakukan dengan membuat proyek utama seperti pembukaan ladang-ladang baru, tanah pertanian, memperbanyak saluran air, serta membangun jalan raya bagi memudahkan pengangkutan dan hubungan antar wilayah di setiap kota seperti Basrah, Kufah, Fustat dan lain-lain. Selain itu, kemudahan infrastruktur seperti sekolah dan rumah sakit juga didirikan untuk memberikan akses kemudahan kepada pembangunan masyarakat. Beliau juga merenovasi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram agar dapat menampung lebih banyak jemaah untuk shalat sehingga, ekonomi rakyat meningkat, kemiskinan dapat dihapuskan pada zamannya sebab keadilan pemerintahan dan konsep hemat cermat keluarga Khalifah sendiri jadi teladan tanpa disuruh.

Bidang Sosial juga tidak lupa dari perjajian Umar terutama dalam peningkatan ilmu pengetahuan. Oleh yang demikian, beliau telah mengarahkan cendekiawan Islam untuk menterjemahkan buku-buku kedokteran dan berbagai macam bidang ilmu lainnya dari Bahasa Yunani, Latin dan Suryani ke Bahasa Arab agar memudahkan umat Islam untuk mempelajarinya. Beliau juga banyak membangun sekolah agar semua rakyatnya berpeluang untuk menuntut ilmu.

Program dakwah dan memperjuangkan syiar Islam yang menitikberatkan kepada penghayatan agama dalam kalangan rakyatnya juga dibangun oleh Umar. Beliau memerintahkan rakyatnya agar mendirikan shalat secara berjamaah di masjid, menjadikan masjid sebagai tempat untuk mempelajari hukum-hukum Islam sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW dan *Khalifah ar-Rasyidin*. Beliau turut memerintahkan Muhammad bin Abu Bakar Al-Hazni di Mekah untuk mengumpulkan dan menyusun hadis-hadis Rasulullah.

Umar juga mengirim 10 orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara dan beberapa orang lagi pendakwah kepada raja-raja India, Turki dan Barbar untuk mengajak mereka memeluk Islam. Selain itu, beliau juga telah menghapuskan fitnah terhadap Saydina Ali dan keluarganya yang disebut dalam khutbah-khutbah Jum'at dan digantikan dengan beberapa potongan ayat suci Al-Quran. Ini dilakukannya, karena Umar mempercayai Saydina Ali dan keluarganya adalah bagian insan mulia yang banyak membantu Rasulullah dalam perjuangan Islam dan sebagai umat Islam, tidak berhak mencaci mereka.

Masa kepemimpinan Umar membawa banyak perubahan dalam sistem perpolitikan dan pemerintahan sebuah negara merupakan konsep pemerintahan yang bijak dari seorang khalifah. Pada saat ini, pelbagai permasalahan dalam pemerintahan negara selalu terjadi baik perkara kecil maupun perkara besar. Dalam perkara kecil masih banyak kita lihat bahwa sistem pemerintahan oleh pemimpin negara tidaklah loyal kepada masyarakatnya, melainkan tujuan seorang pemimpin saat ini naik menjadi seorang pemimpin ialah karena didasarkan pada keinginan untuk berkuasa dan mewujudkan kepentingannya maupun kepentingan kelompok yang mendukungnya. Sedangkan dalam perkara besar saat ini, banyak kita dapati bahwa pemimpin negara di

dunia ini banyak yang telah melakukan penyimpangan dalam memerintah negaranya sehingga menyebabkan banyak terdapat korupsi, kudeta militer serta kemerosotan ekonomi negaranya, pada dasarnya perkara itu semua terjadi karena pemimpin saat ini tidak lagi memiliki moral dan etika politik yang baik dalam memerintah negaranya.

Banyak contoh perilaku, gaya dan kebijakan Khalifah Umar yang dapat dilakukan oleh para pemimpin dunia saat ini khususnya pemimpin negara-negara Islam untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang baik dan akan mendukung kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Pada masa kepemimpinan Umar, pelaksanaan undang-undang Islam dan sunnah adalah pedoman dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Umar, dalam hal ini Umar sangat menekankan kepada masyarakat yang dipimpinnya untuk senantiasa melakukan kewajiban umat Islam dalam melaksanakan undang-undang Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, wacana pelaksanaan hukum jinayah di Aceh saat ini dapat dilaksanakan namun tertantang dengan adanya isu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Masa kepemimpinan Umar yang menerapkan pelaksanaan kehidupan bernegara berdasarkan undang-undang Islam terbukti berjaya dalam membangunkan pemerintahan negara. Sebagai contoh didapati pada masa kepemimpinan Umar tidak lagi dijumpai adanya masyarakat miskin yang berhak untuk menerima zakat, hal ini dikeranakan masyarakat tersebut dibawah kepemimpinan Umar telah hidup sejahterah dan makmur karena pelbagai kebijakan Umar yang sesuai dengan hukum undang-undang Islam seperti bersikap adil dan tegas telah meberjayakan pemerintahan umar dalam memberantas kemiskinan di negaranya. Hal yang demikian berlaku sebaliknya pada masa kepemimpinan pada era globalisasi saat ini, sistem dunia tanpa batas telah menyebabkan terjadinya monopoli perekonomian dari negara maju terhadap negara dunia ketiga yang menyebabkan ketergantungan negara dunia ketiga terhadap bantuan maupun suntikan dana atau keuangan dari negara maju untuk proses pembangunan, hal ini telah menyebabkan negara maju semakin maju dan negara miskin semakin miskin.

5. KESIMPULAN

Umar muncul sebagai ikon penting dalam sejarah *good governance* sebagai seorang muslim, hal demikian dicapai melalui pemugaran kehidupan religius di kalangan umat sehingga terwujudlah suasana kondusif bagi pelaksanaan agenda *islah* dalam pelbagai bidang politik-ekonomi-agama. Walaupun Umar memimpin dalam masa yang sangat singkat, namun kepemimpinan Umar sebagai seorang pemimpin negara telah berhasil mengantarkan kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi penduduk negaranya.

Melalui pelbagai kebijakan yang ditetapkan Umar banyak masyarakat dalam negaranya menjadi lebih baik dikeranakan adanya prinsip dalam menjadikan AL-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan dalam peyelenggaraan pemerintahannya. Selain daripada itu, sikap seorang pemimpin seperti Umar yang merupakan seorang yang bertanggung

jawab, adil dan tegas merupakan sebuah contoh bagi pemimpin-pemimpin dunia saat ini untuk mewujudkan konsep masyarakat madani pada era globalisasi ini.

Kepemimpinan yang baik seperti masa Umar ini hanya dapat diwujudkan dalam sesebuah negara yang memiliki *establishment strong*. Dimana sesebuah negara telah mencapai puncak kekuatan politik dan ekonomi yang baik. Pada era globalisasi ini, gaya pemerintahan seperti Umar ini sangatlah sulit untuk dipraktikkan dalam kehidupan nyata, hal ini dikeranakan kuatnya peranan daripada konsep negara-negara Barat dibandingkan dengan konsep Islam telah mewujudkan ketimpangan yang berat bagi negara Islam yang masih banyak bergantung kepada negara Barat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakam, Abdullah. 2009. *Umar bin Abdul Azis: Peribadi Zuhud Penegak Keadilan*. Jakarta: Alam Raya Enterprise.
- Ali Muhammad Muhammad Al-Shallabi. 2011. *Amirul Mukminin Umar Abdul Aziz*, Kuala Lumpur: Al-Hidayah House of Publishers Sdn. Bhd
- Ammar Lukman dan Mohd. Puzhi Usop (pent). 2010. *Khalifah Zuhud Umar bin Abdul Aziz; Menegak Keadilan Dan Membanteras Penyelewengan Di Bawah Sistem Pemerintahan Islam*. Bandar Baru Bangi: Al-Hidayah Publication
- Mohamad Al-Bakri, Zulkifli. 2010. *Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz; Imam Yang Adil*. Bandar Baru Bangi: Darul Syakir Enterprise
- Mohammad Subki dan Abdul Rahman Al-Hafiz. 2012. *Khalifah Zuhud Umar bin Abdul Aziz*, Kuala Lumpur: PSN Publication
- Nana Audina. 2018. *Sistem Pemerintahan Good Governance Umar Bin Abdul Aziz*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Tarikuddin bin Haji Hassan. 2010. *Pemerintahan Kerajaan Bani Umayyah*. Malaysia: Perniagaan Jahabersa
- Umar Prasetyo. 2018. *Kepemimpinan Spiritual Umar Bin Abdul Aziz*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo
- Yusof Qadhwawi. 1997. *Membangun Masyarakat Baru*, terj. Rusydi Helmi. Jakarta: Gema Insani Press.